

DAMPAK PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Rania Talitha Defi^{1*}, Sarpini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Corresponding email: 244110201166@mhs.uinsaizu.ac.id¹, Sarpini@uinsaizu.ac.id²

Abstrak: Kebakaran hutan liar dan lahan (karhutla) telah menjadi sebuah isu lingkungan yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena terciptanya polusi udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak polusi udara yang disebabkan oleh karhutla terhadap kemakmuran masyarakat dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan review literatur yang melibatkan analisis sumber sekunder yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Menurut penelitian tersebut polusi udara yang disebabkan oleh karhutla dapat menimbulkan ancaman terhadap perkembangan gangguan pernapasan, menimbulkan pengeluaran tambahan untuk pengobatan dan mengganggu proses pendidikan dan pekerjaan yang memberikan penghasilan bagi masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi Islam kasus yang telah dipelajari ini berhubungan dengan prinsip maqashid syariah dan terdiri dari aspek-aspek seperti melestarikan jiwa (Hafz al-Nafs) dan melestarikan harta (Hafz al-Mal). Oleh karena itu pencegahan karhutla, pengendalian polusi dan perlindungan masyarakat yang terdampak diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kata kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencemaran Udara, Kesejahteraan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah.

Abstract: Forest and land fires (karhutla) have become a significant environmental issue that can threaten societal welfare and prosperity due to the resulting air pollution. This study aims to examine the impact of air pollution caused by forest and land fires on community welfare and prosperity from an Islamic economic perspective. This study employs a qualitative method using a literature review approach, involving the analysis of secondary sources relevant to the research topic. The findings indicate that air pollution resulting from forest and land fires can increase the risk of respiratory disorders, impose additional healthcare expenses, and disrupt educational activities and income-generating employment. From an Islamic economic perspective, these issues are closely related to the principles of maqasid al-shariah, particularly the preservation of life (Hifz al-Nafs) and the preservation of wealth (Hifz al-Mal). Therefore, preventing forest and land fires, controlling air pollution, and protecting affected communities are essential measures to safeguard societal welfare and prosperity.

Keywords: Forest and Land Fires, Air Pollution, Economic Well-Being, Sharia Economics, Maqashid Al-Sharia.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran udara serta berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia adalah kebakaran hutan (karhutla). Terjadinya karhutla di hutan atau lahan gambut menyebabkan pelepasan asap dan zat pencemaran yang mampu mencapai tempat-tempat permukiman. Tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. (Mulia & Nofrizal, 2021) dalam penelitian mereka mengenal efek kabut asap karhutla di Pekanbaru telah menemukan adanya korelasi antara kualitas udara dengan sejumlah gangguan fisik seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, pneumonia serta iritasi kulit dan mata. Hal ini membuktikan bahwa karhutla harus dilihat sebagai masalah bukan hanya degradasi lingkungan tetapi juga kesejahteraan manusia.

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesejahteraan masyarakat juga dapat kita lihat dari perkembangan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Indonesia. Menurut (Reuters, n.d, 2026) pada tanggal 14 Oktober 2026 kualitas udara di beberapa daerah namurun karena kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan bahwa ISPU di Kalimantan Tengah telah melebihi 1.200 dan terdapat 283.270 kasus penyakit pernapasan di tujuh provinsi Indonesia per tanggal 13 Oktober 2026. Dari data tersebut kita

dapat melihat betapa pentingnya dampak karhutla yang harus diperhatikan. Namun kasus penyakit pernapasan di daerah yang terkena dampak tidak dapat dilihat sebagai bukti bahwa semua itu disebabkan oleh karhutla.

Perspektif ekonomi menjelaskan bahwa kebakaran hutan dapat mengakibatkan kerugian rusaknya lahan pertanian, penurunan pendapatan, pengeluaran rumah tangga yang meningkat dan penurunan produktivitas kerja. (Anggraini et al., 2023) meneliti biaya kebakaran lahan gambut yang dialami oleh rumah tangga petani di Distrik Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurut hasil penelitian tersebut jenis kerugian yang dihadapi oleh rumah tangga petani antara lain kehilangan pendapatan, pengeluaran pertanian yang meningkat. Pengeluaran medis dan pengeluaran air minum yang meningkat. Kerugian ekonomi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut mencapai Rp773.338.080 di wilayah dan lingkup penelitian tersebut. Sebaliknya menurut (Kiely et al., 2021) kerugian ekonomi yang terjadi akibat kebakaran di Indonesia pada tahun 2015 mencapai sekitar US\$28 Miliar. Kerugian tersebut mencakup kerugian tutupan lahan, emisi karbon dan biaya kesehatan akibat paparan asap. Artinya, konsekuensi ekonomi kebakaran hutan dapat muncul baik pada tingkat rumah tangga maupun tingkat nasional. Namun angka kerugian ekonomi berbeda tergantung lokasi, periode dan metode perhitungan sehingga tidak boleh dibandingkan secara langsung.

Polusi udara yang terkait dengan kebakaran hutan berkontribusi terhadap beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak dalam hal biaya kesehatan dan pengurangan waktu produktif. Gangguan kesehatan di masyarakat akan berarti biaya yang terkait dengan pemeriksaan, perawatan dan transportasi ke pusat kesehatan. Demikian juga orang-orang yang pekerjaan mereka membutuhkan aktivitas di luar ruangan akan sulit untuk melanjutkan aktivitas mereka karena udara yang buruk. Gangguan pada transportasi, kegiatan pendidikan dan bisnis juga bisa berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh laporan *Associated Press* pada bulan Oktober 2026 tentang situasi kabut asap di Kalimantan Barat menunjukkan gangguan kegiatan di bidang kesehatan, transportasi, sekolah dan kegiatan sehari-hari di daerah tersebut (*Associated Press*, n.d, 2026). Meskipun efek-efek ini menunjukkan risiko ekonomi dan sosial namun tingkat kerugian akibat polusi udara harus dibedakan dari kerugian lain yang terkait dengan kebakaran seperti kerusakan lahan dan vegetasi.

Kerangka ekonomi Islam isu kebakaran hutan memiliki relevansi dalam hal pencapaian kesejahteraan, keadilan dan pelestarian kehidupan. Selain mengejar tujuan keuntungan materi ekonomi Islam juga memperhatikan akibat dari aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan alam. Menurut (Putri et al., 2025) tujuan Islam berperan dalam membentuk konsep ekonomi hijau di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, pengurangan polusi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Demikian juga tujuan Islam penting dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena penekanan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan kelestarian lingkungan menurut (Amsari et al., 2024). Mengenai kebakaran hutan salah satu prinsip dalam Islam adalah perlindungan kehidupan (*Hifz al-Nafs*) yang dapat membantu dalam mengevaluasi arti pentingnya menjaga kesehatan prinsip perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) akan merujuk pada upaya untuk mencegah kerugian dari pendapatan, harga dan kehidupan masyarakat. Prinsip lain yaitu kesejahteraan (*Maslahah*) akan membantu untuk kebaikan bersama.

Beberapa artikel ini bisa menjadi dasar untuk meneliti akibat dari kebakaran hutan dan lahan dari sudut pandang lingkungan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan keberlanjutan. (Mulia & Nofrizal, 2021) meneliti dampak polusi udara akibat kabut asap terhadap gangguan kesehatan. (Anggraini et al., 2023) meneliti kerugian finansial yang dialami oleh rumah tangga petani akibat kebakaran lahan gambut sedangkan (Kiely et al., 2021) mengevaluasi akibat ekonomi dari kebakaran di Indonesia dengan memperhitungkan kerusakan lahan, emisi

karbon dan dampak kesehatan. Namun (Amsari et al., 2024; Putri et al., 2025) menganalisis relevansi tujuan hukum Islam dengan pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Literatur yang telah diidentifikasi mempertimbangkan adanya kesempatan untuk mengembangkan sebuah artikel yang akan menganalisis hubungan antara dampak polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan dengan kesejahteraan masyarakat dan relevansinya dalam tujuan Islam. Tujuan utama dari artikel ini bukan membuktikan bahwa hubungan ini belum dijelajahi tetapi merangkum hasil dari studi dengan fokus yang berbeda dalam diskusi yang relevan dengan akibat ekonomi dan tujuan hukum Islam. Kesenjangan ini adalah tujuan utama dari penelitian harus lebih dieksplorasi dalam tinjauan literatur yang komprehensif.

Menurut penjelasan tersebut polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dapat memengaruhi kesehatan, produksi dan penghasilan masyarakat dan oleh karena itu kesejahteraan ekonomi mereka. Masalah ini juga terkait dengan sistem ekonomi Islam termasuk Hifz al-Nafs yang berarti perlindungan jiwa, Hifz al-Mal yang berarti perlindungan harta dan kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan melakukan tinjauan jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari lembaga dan sumber informasi yang dapat diandalkan lainnya. Analisis akan dilakukan terhadap jenis-jenis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan seperti pengeluaran biaya kesehatan, kerugian pendapatan, gangguan produksi dan kerusakan terhadap sarana hidup serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

1. Polusi Udara Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Polusi udara adalah keadaan dimana kualitas udara menurun karena masuknya polutan ke dalamnya yang bisa menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan asap dan polutan. Asap tersebut bisa bergerak sejauh sampai ke wilayah permukiman sehingga orang-orang yang tinggal di dekat wilayah yang terkena dampak berisiko menghadapi masalah kesehatan dan kesulitan dalam melakukan aktivitasnya.

(Mulia & Nofrizal, 2021) menjelaskan hubungan antara polusi udara yang disebabkan oleh kabut asap karhutla dan masalah kesehatan masyarakat Pekanbaru. Ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara indeks Polutan Standar (ISPU) dan masalah kesehatan seperti ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, iritasi kulit dan diare. Artinya polusi udara yang disebabkan oleh karhutla merupakan masalah lingkungan yang terhubung dengan kesehatan masyarakat.

Polusi udara yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dianggap sebagai masalah lingkungan yang mungkin akan berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Gangguan kondisi kesehatan, pembatasan aktivitas di luar ruangan dan gangguan pada aktivitas normal dapat memengaruhi produktivitas dan konsumsi. Namun penting untuk membedakan pengaruh ekonomi dari polusi udara dengan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul akibat kebakaran hutan termasuk kerusakan lahan dan vegetasi.

2. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam studi ini didefinisikan sebagai kondisi yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran serta kelangsungan sumber penghidupan mereka. Selain ukuran pendapatan masyarakat juga bergantung pada beban

biaya dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi gangguan yang memengaruhi aktivitas ekonomi mereka.

Kebakaran hutan dapat memiliki beberapa dampak terhadap kesejahteraan ekonomi. Pertama gangguan kesehatan yang terkait dengan polusi asap dapat mengakibatkan peningkatan biaya pemeriksaan dan pengobatan. Kedua gangguan aktivitas kerja dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan. Ketiga kebakaran yang menyebabkan kehancuran lahan pertanian dapat menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan hasil usaha. Keempat gangguan pada transportasi dan aktivitas usaha dapat menyebabkan peningkatan biaya masyarakat. Diperlukan untuk menganalisis jenis dampak tersebut berdasarkan data yang disediakan dalam literatur.

(Anggraini et al., 2023) telah melakukan studi yang ditunjukkan untuk memperkirakan biaya kebakaran lahan gambut bagi rumah tangga petani di Distrik Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Secara khusus mereka mempertimbangkan biaya pengobatan medis, biaya air minum yang meningkat, biaya usaha pertanian yang meningkat dan hilangnya pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukkan kerugian ekonomi sebesar Rp.773.338.080.

Menurut (Anggraini et al., 2023) hal ini berfokus pada pengeluaran total yang dibebankan pada rumah tangga sebagai akibat dari pembakaran lahan gambut bukan hanya kerugian yang dialami akibat polusi udara. Mengingat hal itu hasil penelitian tersebut digunakan sebagai gambaran efek ekonomi dari kebakaran hutan dan bukan sebagai pengukuran kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat paparan asap. Berdasarkan asumsi ini kesejahteraan ekonomi dalam penelitian ini dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti pengeluaran kesehatan, pendapatan produktivitas kerja, biaya kegiatan ekonomi, dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

3. Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah) adalah istilah yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi dari bahaya. Dalam istilah ekonomi Islam aktivitas ekonomi diukur berdasarkan manfaatnya bukan hanya dalam bentuk materi tetapi juga dari aspek dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan manusia, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Menurut (Putri et al., 2025) Maqashid Syariah menjadi dasar pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. (Kholil, 2025) berfokus pada kontribusi Maqashid Syariah dalam pembangunan berkelanjutan ekonomi Islam dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi menurut kedua penulis tersebut Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai dasar normatif untuk analisis isu kebakaran hutan yang berdampak pada kesehatan, hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berikut penelitian analisis Maqashid Syariah didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut:

a. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Perlindungan kehidupan merupakan proses untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Mengenai kebakaran hutan, polusi udara yang menyebabkan masalah kesehatan adalah hal yang relevan terkait dengan pilar ini. Pencegahan kebakaran, pencegahan polusi udara dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam kerangka keselamatan masyarakat. Perlindungan kehidupan terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena masalah kesehatan dapat menaikkan biaya hidup masyarakat dan membatasi aktivitas produktif mereka (Mulia & Nofrizal, 2021; Putri et al., 2025).

b. Perlindungan Harta (Hafz al-Mal)

Perlindungan harta adalah tentang menjaga aset, pendapatan dan sarana hidup agar aman dari kerugian yang akan berdampak negatif pada individu dan masyarakat.

Mengenal kebakaran hutan konsep ini dapat diterapkan dalam analisis kerugian pendapatan, peningkatan biaya usaha, biaya pengobatan dan penghancuran sarana hidup. Menurut (Anggraini et al., 2023) ada peningkatan biaya yang di tanggung oleh rumah tangga petani akibat kebakaran lahan gambut yang menyebabkan kerugian pendapatan. Akibatnya langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan efek kebakaran hutan juga dapat diterapkan untuk melindungi kekayaan.

c. Kesejahteraan (Maslahah)

Kesejahteraan berarti suatu yang berguna dan baik yang harus dicapai oleh masyarakat sedangkan bencana harus dihindari atau diminimalkan. Mengenai kebakaran hutan manfaatnya dapat diidentifikasi dari tujuan bersama yaitu mendapatkan udara yang lebih bersih, perlindungan kesehatan, sumber penghasilan dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini penting untuk dicatat bahwa aktivitas ekonomi dan penggunaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penanganan kebakaran hutan dapat dibahas dari aspek pengurangan bencana (Kholil, 2025; Putri et al., 2025).

Tiga elemen tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Perlindungan jiwa digunakan untuk menganalisis efeknya terhadap kesehatan sementara perlindungan harta digunakan untuk menilai efeknya terhadap penghasilan dan pengeluaran individu. Kesejahteraan di sisi lain digunakan untuk menilai kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penggunaan elemen-elemen tersebut tidak berarti setiap kerugian ekonomi secara pasti merupakan pelanggaran dari Maqasid Syariah tetapi mereka digunakan untuk memahami relevansi isu kebakaran hutan dalam mencapai tujuan perlindungan manusia dan kesejahteraan.

4. Hubungan pencemaran Udara, Kesejahteraan Ekonomi dan Ekonomi Islam

Ada hubungan pencemaran udara dari kebakaran hutan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan ekonomi Islam yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara faktor lingkungan, dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Penurunan kualitas udara mungkin memiliki beberapa hubungan dengan gangguan kesehatan dan gangguan rutinitas sehari-hari mungkin dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, produktivitas tenaga kerja dan pendapatan. Namun kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi dalam arti penghancuran lahan dan gangguan proses produksi. Oleh karena itu analisis tersebut harus membedakan dampak yang disebabkan oleh polusi udara dari kerusakan akibat kebakaran secara umum (Anggraini et al., 2023; Mulia & Nofrizal, 2021).

Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk mengeksplorasi konsekuensi yang dipertimbangkan menggunakan konsep seperti perlindungan kehidupan, perlindungan harta dan memaksimalkan manfaat. Yang pertama merujuk pada kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari polusi. Konsep kedua ini terkait dengan pengurangan kerugian pendapatan dan beban ekonomi bagi keluarga. Akhirnya konsep memaksimalkan manfaat menyoroti kebutuhan untuk mengelola lingkungan dan aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam (Kholil, 2025; Putri et al., 2025).

Dengan demikian, landasan teori ini menjadi dasar untuk menganalisis literatur mengenai dampak pencemaran udara akibat karhutla terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Konsep pencemaran udara digunakan untuk memahami persoalan lingkungan, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dampak ekonomi, sedangkan Maqashid Syariah menjadi kerangka normatif untuk menelaah keterkaitan dampak tersebut dengan perlindungan jiwa, perlindungan harta, dan kemaslahatan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dimana penelitian perpustakaan akan digunakan untuk menyelidiki efek polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari data sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi dan literatur yang relevan lainnya. Referensi akan ditelusuri melalui Google Scholar, portal yang berbeda untuk jurnal ilmiah dan situs web dari lembaga yang relevan menggunakan kata kunci seperti "kebakaran hutan dan lahan", "karhutla", "polusi udara", "asap kabut", "kesejahteraan masyarakat", "kerugian ekonomi", "maqashid ayariah", dan "ekonomi Islam". Sumber dari tahun 2021-2026 akan menjadi prioritas dalam penelitian ini sedangkan sumber sebelumnya periode tersebut akan dimasukkan dalam penelitian jika diperlukan untuk menjelaskan beberapa konsep dasar. Literatur akan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kejelasan informasi dan keandalan sumbernya.

Data dianalisis secara deskriptif melalui proses mengidentifikasi, mengkategorikan, membandingkan dan menginterpretasikan informasi dengan berbagai literatur. Analisis ini berfokus pada tiga bidang utama yaitu polusi udara akibat kebakaran hutan, dampak hal tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tinjauan atas isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Informasi yang dianalisis mencakup gangguan kesehatan, pengeluaran masyarakat, perubahan produktivitas dan pendapatan serta prinsip Hifz al-Nafs, Hifz al-Mal, dan Maslahah. Perbandingan dilakukan antara sumber-sumber tersebut dengan tujuan mencari pola, kesamaan, perbedaan dan hubungan dalam temuan tersebut. Selain itu kerugian akibat polusi udara dipisahkan dari kerugian akibat kebakaran hutan secara umum sehingga ada konsistensi dalam interpretasi. Konsistensi analisis dicapai melalui penyusunan informasi dengan sumber referensi, perbandingan data yang ditemukan dari beberapa sumber bila kemungkinan dan pemisah temuan penelitian dari interpretasi penulis. Semua temuan dari studi ini disajikan secara naratif untuk menunjukkan hubungan antara polusi udara akibat kebakaran hutan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan ekonomi Islam (Yadav, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Karhutla dan Pencemaran Udara di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu masalah lingkungan yang berdampak pada kualitas udara serta aspek sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat. Pembakaran vegetasi dan lahan gambut menghasilkan asap yang mengandung partikel PM 2,5 yang bisa menembus sistem pernapasan. Asap tersebut menyebar ke wilayah perkotaan sehingga membuat masyarakat yang jauh dari lokasi kebakaran pun menderita akibat dampaknya.

Dari kasus kebakaran hutan pada bulan Oktober 2026 terlihat bahwa membasmi kebakaran hutan bukanlah hal yang mudah. Menurut kementerian kehutanan terdapat variasi yang sangat tinggi dalam jumlah titik panas per hari. Pada tanggal 5 Oktober 2026 terdapat 1.359 titik panas yang diamati sedangkan pada tanggal 4 Oktober 2026 hanya terdapat 527 titik panas yang diamati. Selain itu, pada tanggal 8 Oktober 2026 terdapat 387 titik panas yang diamati sedangkan pada tanggal 7 Oktober 2026 terdapat 1.176 titik panas (Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, 2026).

Perubahan jumlah titik panas menunjukkan bahwa kondisi kebakaran bisa berubah dengan sangat cepat. Namun jumlah titik panas tidak bisa digunakan secara langsung untuk mengetahui jumlah polusi udara atau kerusakan ekonomi yang disebabkan olehnya. Titik panas hanyalah indikasi potensi terjadinya kebakaran sedangkan penilaian kualitas udara membutuhkan fakto-faktor lain seperti partikel-partikel yang ada di udara.

Efek dari kebakaran hutan juga bisa meluas di luar daerah dimana kebakaran hutan tersebut terjadi. Menurut (*Reuters*, n.d, 2026) kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia telah mengganggu kegiatan di banyak daerah Asia Tenggara termasuk kegiatan pendidikan dan penerbangan. Kasus ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan memiliki kemampuan untuk menimbulkan efek yang melampaui batas negara baik dalam hal kesehatan maupun kegiatan sosial ekonomi.

Dari interpretasi masalah kebakaran hutan harus dilihat sebagai suatu yang melampaui masalah lingkungan. Analisis dampak dari masalah tersebut juga harus memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat, aktivitas masyarakat dan kelestarian ekonomi. Melalui penggunaan titik panas, kualitas udara dan indikator kesehatan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari masalah tersebut.

2. Perkembangan Kasus ISPA dan Dampak Terhadap Masyarakat

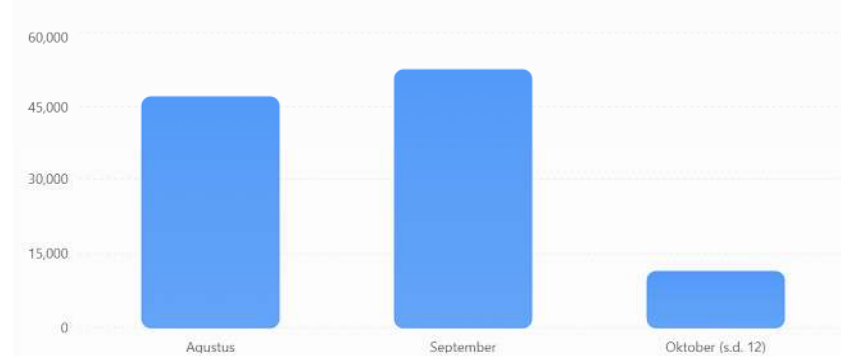
ISPA merupakan salah satu parameter kesehatan yang harus menjadi fokus perhatian pada saat terjadi pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Seperti yang tercantum dalam sebuah artikel berita ANTARA yang mengutip kementerian kesehatan pada bulan Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di tujuh provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan telah mencapai 277.075 kasus per tanggal 12 Oktober 2026. Dari total kasus tersebut sebanyak 62.400 kasus dialami oleh anak-anak usia 0-5 tahun. Pemerintah juga melaporkan telah melakukan mobilisasi 2.106 tenaga kesehatan dan menyediakan 2,8 juta masker (*Dinkes Sumsel catat 52*, n.d, 2026).

Data ini menunjukkan tingginya permintaan fasilitas kesehatan di wilayah yang terkena dampak. Namun fakta bahwa terdapat banyak pasien ISPA tidak berarti semua kasus penyakit tersebut disebabkan oleh paparan asap dari kebakaran hutan. Untuk menentukan sebab akibatnya data harus dikumpulkan yang menunjukkan tingkat paparan terhadap polutan dalam hubungannya dengan status kesehatan masyarakat.

Sebuah gambar lainnya memperlihatkan di provinsi Sumatera Selatan dimana angka yang disediakan oleh Departemen Kesehatan setempat dan dikutip oleh ANTARA menunjukkan bahwa jumlah total pasien ISPA adalah 47.020 kasus pada bulan Agustus 2026 dan meningkat menjadi 52.483 kasus pada bulan September 2026. Dengan demikian angka pada bulan sebelumnya. Angka pada awal Oktober menunjukkan 11.359 kasus hingga saat itu sehingga tidak bisa dibandingkan dengan jumlah total kasus untuk seluruh bulan (*Dinkes Sumsel catat 52*, n.d, 2026).

Kasus ISPA yang dilaporkan

Data Agustus dan September mencakup satu bulan penuh; data Oktober hanya laporan awal hingga 12 Oktober.



Angka Oktober bersifat sementara dan tidak dapat dibandingkan langsung sebagai total bulanan.

Gambar 1. Kasus ISPA di Sumatera Selatan, Agustus-Oktober 2026

Sumber: (*Dinkes Sumsel catat 52*, n.d, 2026)

Data yang digunakan adalah 47.020 kasus pada Agustus, 52.483 kasus pada September, dan 11.359 kasus pada Oktober hingga tanggal pelaporan. Sumber: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, dikutip (*Dinkes Sumsel catat 52*, n.d,2026).

Angka ini untuk bulan Oktober hanya bersifat sementara karena masa pengamatan untuk bulan ini belum selesai. Selain itu akan tidak adil jika kita memuat kesimpulan tentang penurunan jumlah kasus ISPA untuk bulan Oktober dengan menggunakan angka ini.

Aspek kesejahteraan masyarakat kesehatan dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran dan berdampak pada kegiatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Masalah Kesehatan dapat membuat keluarga tersebut mengeluarkan biaya untuk menyediakan layanan kesehatan seperti membayar biaya tes, obat-obatan, transportasi ke fasilitas medis dan juga waktu yang dibutuhkan untuk membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas medis.

Meskipun tidak banyak kasus kesehatan yang diperlukan untuk mengukur kerugian ekonomi namun untuk menghitung kerugian ekonomi lebih dibutuhkan detail-detailnya seperti biaya pengobatan, jumlah hari kerja yang hilang, perubahan pendapatan dan jumlah paparan polusi udara. Itulah sebabnya data kesehatan yang digunakan dalam artikel ini digunakan untuk menggambarkan biaya sosial dan bukan kerugian ekonomi dari kebakaran hutan.

3. Pengaruh Polusi Udara Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Akibat ekonomi dari kebakaran hutan bisa muncul dalam berbagai bentuk misalnya biaya medis yang lebih tinggi, efisiensi yang lebih rendah, gangguan terhadap operasi bisnis dan penurunan penghasilan. Akibat polusi udara individu yang bekerja di luar ruangan mungkin akan sulit menyelesaikan pekerjaannya. Bisnis yang bergantung pada kunjungan konsumen juga bisa terpengaruh akibat berkurangnya aktivitas luar ruangan pada masyarakat.

Dampak terhadap suatu keluarga bisa berbeda-beda. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah bisa lebih rentan terhadap risiko terutama jika mereka harus menanggung biaya tambahan yang berkaitan dengan kesehatan dan kerugian pendapatan. Situasi bisa semakin sulit jika pekerjaan yang mereka lakukan tidak memberikan mereka jam kerja yang fleksibel atau keamanan pendapatan dalam keadaan darurat.

Dari sudut pandang yang dilakukan (Anggraini et al., 2023) tentang biaya kebakaran di lahan gambut pada rumah tangga dan petani di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dampak ekonomi dari kebakaran dapat terlihat. Menurut studi tersebut biaya ekonomi totalnya mencapai Rp.773.338.080 di lokasi penelitian. Biaya ekonomi tersebut terdiri dari biaya obat-obatan, biaya tambahan air minum, biaya pertanian dan kerugian pendapatan petani. Kerugian pendapatan merupakan salah satu kerugian terbesar dari studi tersebut.

Studi yang dilakukan oleh temuan (Anggraini et al., 2023) menunjukkan bahwa kebakaran hutan mungkin memiliki konsekuensi ekonomi yang lebih besar selain pengeluaran untuk kesehatan. Keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan mereka juga mungkin mengalami kenaikan biaya produksi dan kehilangan pendapatan. Namun semua statistik ini di kumpulkan dari tempat dan cakupan penelitian tertentu. Karena penelitian ini bertujuan untuk menghitung kerugian yang terkait dengan kebakaran lahan gambut maka tidak dapat dianggap sebagai kerugian yang hanya berasal dari polusi udara saja.

Kaitannya dengan penelitian ini penting untuk membedakan efek ekonomi dari kebakaran hutan menjadi efek langsung dan tidak langsung. Efek langsungnya adalah pengeluaran untuk melakukan pemeriksaan medis, membeli obat-obatan dan transportasi menuju fasilitas medis. Efek tidak langsungnya adalah waktu yang hilang akibat

pekerjaan, hilangnya peluang penghasilan serta gangguan terhadap bisnis. Kerusakan lahan dan aset produksi adalah faktor lain dari kerugian kebakaran hutan yang harus dipisahkan dari kerugian yang berhubungan dengan asap.

Status ekonomi masyarakat tidak dapat diukur hanya berdasarkan pendapatan saja. Ada faktor-faktor lain yang perlu diperhitungkan seperti kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketersediaan sarana hidup, biaya kesehatan dan kemampuan mengatasi keadaan darurat. Untuk memahami secara jelas sejauh mana dampaknya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penyesuaian tingkat paparan dengan biaya perawatan kesehatan, perubahan pendapatan dan hari kerja yang hilang.

4. Menganalisis Pengaruh Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Perspektif Ekonomi Islam

Masalah lingkungan seperti polusi udara akibat pembakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menjadi masalah lingkungan saja tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, kondisi keuangan dan kelestarian aktivitas ekonomi. Jika aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi terbatas karena kabut asap maka dapat mengakibatkan biaya kesehatan, produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat menurun. Jadi sudah jelas bahwa masalah karhutla perlu diperhatikan Bersama dengan semua kerugian yang dialami masyarakat terutama kelompok rentan masyarakat dan rumah tangga yang bergantung pada aktivitas pertanian. Pendekatan ekonomi Islam dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ini dalam hal perlindungan kehidupan, perlindungan harta benda dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2025) mengenai tujuan Syariah Islam dalam mengembangkan ekonomi hijau dapat menjadi dasar dari hubungan ini.

a. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafz)

Penyakit yang timbul akibat paparan asap kebakaran hutan menunjukkan bahwa perlindungan jiwa harus dipertimbangkan saat menangani masalah tersebut. Informasi mengenai kasus infeksi pernapasan akut (IPA) di daerah yang terkena dampak merupakan bukti nyata bahwa layanan kesehatan harus mempersiapkan diri terutama dalam menangani lebih banyak kebakaran dan polusi di udara. Namun jumlah kasus IPA tidak secara mutlak merupakan ukuran kerusakan akibat kebakaran hutan karena masih ada faktor lain yang bisa berkontribusi terhadap kesulitan pernapasan.

Perlindungan jiwa akan tercapai melalui pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, komunitas risiko secara efektif dan memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang terkena dampak kebakaran hutan. Selain itu perhatian khusus harus memberikan pada kesehatan anak-anak, orang tua, wanita hamil dan masyarakat yang bermasalah pernapasan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai implementasi perlindungan jiwa (Hifz al-Hafs) karena keselamatan dan kesehatan manusia menjadi prioritas. Oleh karena itu efektivitas penanganan kebakaran hutan tidak hanya diukur dengan mengurangi jumlah titik panas tetapi juga dengan perlindungan kesehatan dan mengembalikan kegiatan sehari-hari masyarakat.

b. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga bisa menurunkan kesejahteraan ekonomi karena adanya kerusakan aset produktif, naiknya biaya kesehatan, tergantungnya pekerjaan dan penurunan penghasilan. (Anggraini et al., 2023) memberikan informasi tentang kerugian ekonomi yang dialami anggota rumah tangga petani karena kebakaran lahan gambut di Distrik Air Sugihan, Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasilnya terlihat bahwa ada beban ekonomi bagi petani yang asetnya bergantung pada tanah dan kegiatan pertanian. Namun kerugian yang berkaitan dengan kebakaran harus dibedakan dengan kerugian yang disebabkan oleh udara yang tercemar.

Solusi untuk masalah ini adalah pencegahan kebakaran, pemulihan lahan yang rusak, perlindungan penghidupan dan memberikan bantuan kepada rumah tangga yang mengalami kerugian. Idealnya bantuan tersebut diberikan setelah mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga bantuan tersebut diberikan kepada penerima yang tepat. Selain itu penilaian kerugian harus memperhitungkan biaya kesehatan, absen dari pekerjaan, aset yang rusak dan perubahan penghasilan. Hal ini sesuai dengan prinsip Hifz al-Mal yaitu menjaga aset dan penghidupan sehingga anggota masyarakat tidak lagi menderita secara ekonomi akibat kebakaran hutan.

c. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Maslahah)

Polusi udara akibat kebakaran hutan dapat memengaruhi masyarakat yang tidak tentu terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kebakaran hutan. Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan mempertimbangkan kerugian ekonomi bagi pemilik tanah atau operator tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang hanya bermotivasi secara ekonomi tanpa memperhitungkan risiko bahaya kesehatan, degradasi lingkungan dan gangguan kehidupan bisa pada akhirnya membuat masyarakat lebih merugi dalam jangka Panjang.

Pelaksanaan Masalah dapat dilakukan melalui kebijakan pencegahan kebakaran, penegakan aturan terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan, pemulihan lingkungan dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat yang terkena dampak. Sangat penting peran pemerintah, operator dan masyarakat terpenuhi sehingga biaya kebakaran hutan tidak ditanggung oleh mereka yang paling tidak mampu menanggungnya. Prinsip ekonomi Islam bisa digunakan untuk menentukan apakah kebijakan menangani kebakaran hutan tidak hanya akan mengurangi kerusakan lingkungan tetapi juga akan melindungi kesehatan, menjaga mata pencaharian dan menguntungkan masyarakat. Evaluasi ini adalah analisis normatif berdasarkan literatur dan bukan hasil pengukuran empiris sejauh mana hukum syariah oleh pemerintah dan operator.

5. Implikasi Kebijakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu menghubungkan pengadilan kebakaran, perlindungan kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Data titik panas dapat membantu menggambarkan perkembangan indikasi kebakaran, sedangkan data kesehatan memberikan informasi mengenai kebutuhan perlindungan masyarakat. Kedua jenis data tersebut perlu dianalisis secara berdampingan, tetapi tidak dapat dipertukarkan karena penurunan jumlah titik panas tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kualitas udara telah membaik atau risiko kesehatan telah berakhir. Oleh karena itu, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan untuk mengurangi dampak karhutla terhadap kesejahteraan masyarakat.

a. Meningkatkan Pencegahan dan Pemantauan Kebakaran

Pencegahan kebakaran harus dianggap sebagai salah satu prioritas utama dalam pemantauan daerah rawan kebakaran, pembinaan lapangan, pemberitahuan peringatan dini dan penyediaan informasi yang mudah dipahami tentang kualitas udara bagi warga. Informasi tersebut juga harus berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar masyarakat dapat melindungi diri mereka berdasarkan kualitas udara di daerah mereka. Sangat penting untuk menilai keberhasilan pencegahan kebakaran dengan melihat perkembangan kebakaran dan kualitas udara.

b. Meningkatkan Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Sangat penting bagi pemerintah dan penyediaan layanan kesehatan memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak insiden kebakaran memiliki akses terhadap informasi risiko serta pemeriksaan kesehatan dan layanan kesehatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas dan

peralatan perlindungan karena risiko paparan asap harus dipertimbangkan terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Hal ini akan membantu meminimalkan hambatan lebih lanjut dalam akses terhadap layanan kesehatan dan beban tambahan bagi rumah tangga.

c. Memberikan Perlindungan Ekonomi bagi Rumah Tangga

Tindakan apapun yang diambil terkait insiden kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara bersamaan dengan mendokumentasikan kerugian ekonomi yang dialami oleh anggota masyarakat seperti biaya perawatan kesehatan, hilangnya hari kerja, penurunan pendapatan dan kerugian mata pencaharian. Hasil dari proses dokumentasi akan memberikan panduan mengenai jenis bantuan dan upaya pemulihan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dalam kasus mata pencaharian berbasis pertanian atau gambut upaya pemulihan lingkungan sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi.

d. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Penanganan Masalah Kebakaran Hutan

Prinsip Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-Mal (perlindungan harta) dan Maslahah (kepentingan umum) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dan penilaian kebijakan pengelolaan kebakaran hutan. Pelestarian jiwa dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dari paparan asap dan layanan kesehatan, pelestarian harta dapat dilakukan dengan memulihkan harta dan mata pencaharian masyarakat, sementara kepentingan umum terpenuhi jika kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dibantu dengan proses pengawasan, akuntabilitas pihak yang terlibat dan evaluasi hasil kebijakan sehingga bukan hanya sekedar teori.

e. Pengembangan Pengukuran Kerugian Ekonomi yang Lebih Tepat

Kebutuhan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang pengukuran efek ekonomi yang khususnya berkaitan dengan polusi udara akibat masalah kebakaran hutan. Pengukuran tersebut mencakup biaya pengobatan, hari kerja yang hilang, perubahan pendapatan dan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Semua pengukuran tersebut harus dibandingkan dengan tingkat polusi udara dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian kerugian akibat polusi udara dapat dibedakan secara tepat dari kerugian lainnya akibat masalah kebakaran hutan.

Cara mengatasi masalah kebakaran hutan adalah dengan mengintegrasikan langkah langkah pencegahan kebakaran, memastikan kesehatan dan revitalisasi ekonomi yang baik serta pengelolaan lingkungan yang baik. Prinsip ekonomi Islam dapat menjadi panduan arah kebijakan dengan memastikan terlebih dahulu bahwa nyawa manusia dan harta benda menjadi prioritas. Namun diperlukan juga untuk menilai efektivitas dari setiap pendekatan ini berdasarkan hasil yang nyata agar rekomendasi dapat disempurnakan.

6. Sintesis Hasil Diskusi

Analisis literatur menunjukkan bahwa pengaruh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi mereka. Kualitas udara yang buruk karena asap dapat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat karena tingginya pengeluaran kesehatan, rendahnya produktivitas tenaga kerja dan gangguan terhadap sumber penghasilan rumah tangga. Artinya pengaruh karhutla harus dilihat dari sudut pandang keterkaitan masalah tersebut bukan hanya sebagai polusi lingkungan. Namun skala kerusakan ekonomi yang langsung dipengaruhi oleh kualitas udara yang buruk tidak dapat diestimasi tanpa adanya analisis tingkat kontaminasi asap, kondisi kesehatan masyarakat, pengeluaran rumah tangga dan penghasilan masyarakat.

Dari sudut pandang sistem ekonomi Islam kesejahteraan masyarakat tidak hanya melibatkan kepuasan kebutuhan materi mereka tetapi juga keamanan hidup, kelangsungan sumber penghidupannya dan pencapaian kesejahteraan kolektif. Hifz al-Nafs berarti pentingnya menjaga kesehatan dan keamanan manusia sedangkan hifz al-Mal mengacu pada perlindungan harta dan kelangsungan kegiatan penghasil pendapatan keluarga. Masalah berarti mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari setiap kegiatan untuk masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan tiga prinsip ini pengelolaan kebakaran hutan harus mencakup upaya pencegahan kebakaran, pelindungan kualitas udara, pelindungan kesehatan manusia dan pemulihan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu ekonomi Islam dapat diterapkan sebagai dasar normatif untuk menilai upaya pengelolaan kebakaran hutan sedangkan studi empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengukur efek polusi udara terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

SIMPULAN

Melalui analisis artikel ilmiah dan data sekunder terlihat jelas bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memiliki kemampuan untuk menghasilkan dampak yang bisa memiliki efek jangka panjang. Efek tersebut mulai dari degradasi lingkungan, gangguan terhadap kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat. Produksi asap bisa menyebabkan penyakit pernapasan, biaya medis yang tinggi dan gangguan terhadap proses pendidikan, kerja dan penghidupan. Efek tersebut cenderung akan memengaruhi individu-individu yang tidak memiliki akses terhadap perawatan medis dan bantuan ekonomi. Namun hasil dari studi ini harus diartikan secara relatif karena tidak semua kasus infeksi pernapasan akut (IPA) disebabkan oleh karhutla dan juga jumlah titik panas tidak cukup untuk menentukan tingkat polusi udara. Karena studi ini menggunakan metode studi perpustakaan maka tidak mungkin untuk mengukur kerugian ekonomi secara langsung akibat polusi udara.

Menurut perspektif ekonomi Islam, upaya mengatasi dampak karhutla sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya menjaga keselamatan jiwa (Hifz al-Nafs), melindungi harta (Hifz al-Mal), dan mewujudkan kemaslahatan bersama (Maslahah). Penerapan prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pencegahan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko, pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, serta penyediaan perlindungan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Oleh sebab itu, penanganan karhutla perlu mengintegrasikan kepentingan lingkungan, kesehatan publik, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Penelitian berikutnya perlu memanfaatkan data lapangan yang mencakup tingkat paparan polusi, kondisi kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan perubahan pendapatan. Data tersebut dapat membantu menghasilkan penilaian yang lebih terukur mengenai hubungan antara pencemaran udara akibat karhutla dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Anggraini, N., Harianto, H., & Harmini, H. (2023). Biaya Kebakaran Gambut yang Ditanggung oleh Rumah Tangga Petani di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(2), 305–315. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.2.305>
- Dinkes Sumsel catat 52. (n.d.).
- Explainer_ Why is the haze so bad in Southeast Asia this year __ Reuters. (n.d.).

- Hotspot Nasional Turun 789 Titik, Kemenhut Terus Perkuat Penanganan Karhutla.* (n.d.).
Indonesian villagers on Borneo struggle for water as El Niño intensifies peatland fires _
Edna Tarigan And Victoria Milko _ *The Associated Press.* (n.d.).
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Kiely, L., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Papargyropoulou, E., Conibear, L., Wiedinmyer, C., Knote, C., & Adrianto, H. A. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. *Nature Communications* , 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27353-x>
- Putra Mulia, Nofrizal, W. N. D. (2021). *Jurnal Ners Indonesia, Vol. 12, No. 1, September 2021 Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik.* 12(1).
- Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. etc. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10.
- Yadav, D. (2022). Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review. *Asia-Pacific Education Researcher*, 31(6), 679–689. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0>